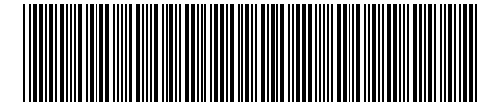




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099099/2020**



DS:5936-2072-4230-2001

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005)    | MAHKAMAH AGUNG                            |
| 2. Unit Organisasi            | : (03)     | Ditjen Badan Peradilan Umum               |
| 3. Provinsi                   | : (03)     | JAWA TENGAH                               |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (099099) | PENGADILAN NEGERI KENDAL                  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 107.000.000 ( SERATUS TUJUH JUTA RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp.	107.000.000
Rp.	107.000.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	107.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN SEMARANG II | (134) Rp. | 107.000.000 |
|---------------------|-----------|-------------|

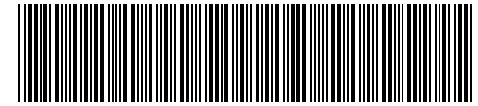
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

JAKARTA, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099099/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:5936-2072-4230-2001

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
Kode>Nama Satker : (099099) PENGADILAN NEGERI KENDAL

Kuasa Pengguna Anggaran : ESTINIGSIH DWI WAHYUNI, SH  
Bendahara Pengeluaran : EMI SURYANI, A.Md  
Pejabat Penanda Tangan SPM : AMECCA MILA PUSPASARI, S.Kom

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			107.000.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			107.000.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			107.000.000
Sasaran Program	01	Terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum			
Indikator Kinerja Program	01	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	124495	Perkara	
	02	Pelaksanaan pelayanan peradilan umum	111584	Jam Layanan	
	03	Pembinaan tenaga teknis peradilan umum	800	Orang	
	04	Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	25	satker	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum			
Indikator Output Program	01	Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	124495	Perkara	
	02	Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54482	Perkara	
	03	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	118766	Jam Layanan	
	04	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	3888	Perkara	
	05	Perkara PHI Yang Diselesaikan Tepat Waktu	0	Perkara	
	06	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	81	Perkara	
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			107.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum			
	02	Pos bantuan hukum			
	03	perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung			
	04	perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu			
	05	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
Output Kegiatan	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum [PN]	216	Jam Layanan	21.600.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	111584	Jam Layanan	
Output Kegiatan	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	200	Perkara	85.400.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	124000	Perkara	

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099099/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5936-2072-4230-2001

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
Kode>Nama Satker : (099099) PENGADILAN NEGERI KENDAL  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
099099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	-	107.000	-	-	-	107.000		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	107.000	-	-	-	107.000		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	107.000	-	-	-	107.000		
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum [PN]	-	21.600	-	-	-	21.600	03.02	
01	RM	-	21.600	-	-	-	21.600	134	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	-	85.400	-	-	-	85.400	03.02	
01	RM	-	85.400	-	-	-	85.400	134	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>107.000</b>	-	-	-	<b>107.000</b>		

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099099/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5936-2072-4230-2001

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (03) JAWA TENGAH  
Kode>Nama Satker : (099099) PENGADILAN NEGERI KENDAL

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099099	<b>PENGADILAN NEGERI KENDAL</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	984	2.183	3.831	5.864	6.163	6.848	11.888	11.567	12.540	12.797	14.327	18.008	107.000
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	984	2.183	3.831	5.864	6.163	6.848	11.888	11.567	12.540	12.797	14.327	18.008	107.000
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	984	2.183	3.831	5.864	6.163	6.848	11.888	11.567	12.540	12.797	14.327	18.008	107.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	984	2.183	3.831	5.864	6.163	6.848	11.888	11.567	12.540	12.797	14.327	18.008	107.000
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.692	32.260
		- PNBP (425232)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	73	920
		- PNBP (425233)	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	857	10.240
		- PNBP (425239)	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.762	21.100

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099099/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:5936-2072-4230-2001

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [03] JAWA TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [099099] PENGADILAN NEGERI KENDAL

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099099/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:5936-2072-4230-2001

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [03] JAWA TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [099099] PENGADILAN NEGERI KENDAL

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001